

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan mengusahakan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Secara umum, suatu pemerintahan dapat dikatakan berhasil apabila dapat mengatasi permasalahan di berbagai bidang termasuk perekonomian. Pada umumnya setiap perekonomian di suatu negara selalu ingin mencapai tingkat kemakmuran ekonomi yang tinggi, yang ditandai dengan tingkat kesempatan kerja penuh, yang berarti rendahnya pengangguran pada faktor-faktor produksi yang ada dalam perekonomian (Sukirno, 2000).

Salah satu masalah ekonomi yang dikhawatirkan para pemikir ekonomi adalah inflasi, karena inflasi dapat mengukur atau menentukan kestabilan ekonomi suatu negara. Inflasi merupakan faktor penting penyebab gejala ekonomi, dan pemerintah harus memperhitungkannya karena dapat berdampak negatif terhadap struktur biaya produksi dan tingkat kesejahteraan (Putri, 2017). Inflasi merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab gejala ekonomi yang memprihatinkan, karena tidak hanya berdampak pada satu hal, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap sistemika dari besaran produksi dan tingkat kekayaan masyarakat. Inflasi mengacu pada situasi di mana harga komoditas terus meningkat (Nagari & Suharyono, 2017). Sementara inflasi yang tinggi mengurangi hak rakyat atas penghidupan, hal itu juga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan produktivitas suatu negara.

Oleh karena itu, diperlukan adanya stabilitas yang terjadi dalam pertumbuhan ekonomi negara. Kestabilan ekonomi dapat terwujud jika negara mengendalikan inflasi dengan baik. Inflasi akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian apabila inflasi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara ke arah yang diinginkan (Budhi & Sipayung, 2013). Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu kerangka bagi

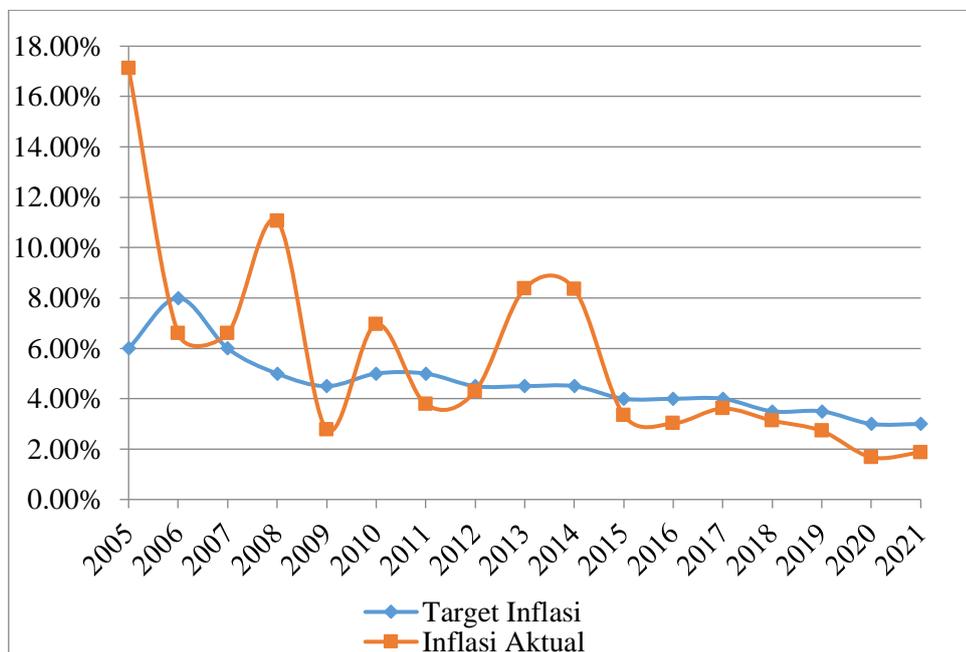
Bank Indonesia untuk mewujudkan pengendalian inflasi yang baik di Indonesia.

Krisis tahun 1998 menyadarkan Bank Indonesia akan pentingnya pengendalian inflasi. Faktanya, inflasi berdampak besar pada agregat ekonomi makro Indonesia. Inflasi yang tinggi menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat karena pendapatan riil masyarakat juga menurun. Inflasi yang tidak stabil mempengaruhi keputusan konsumsi, produksi dan investasi masyarakat. Tidak hanya itu, inflasi yang rendah juga mempengaruhi aktivitas perekonomian. Hal ini menuntut Bank Indonesia untuk mengubah struktur kelembagaan, sehingga Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengendalikan laju inflasi. Perubahan peraturan ini dilakukan dengan mengganti UU Bank Indonesia No. 13 Tahun 1968 dengan UU No. 23 Tahun 1999 (Pohan, 2008).

Disahkannya UU No. 23 tahun 1999, membuat Bank Indonesia menjadi lembaga yang independen. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini menyiratkan bahwa tujuan kebijakan moneter Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas harga (inflasi). Implementasi *Inflation Targeting Framework* (ITF) dimulai pada Juli 2005 ketika Bank Indonesia secara jelas mengumumkan target inflasi yang akan dicapai. Penggunaan ITF sebagai kerangka utama kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan tingkat target inflasi kemudian mengarahkan ekspektasi dan inflasi aktual ke dalam target yang ditentukan (Setiawan, 2011).

Pencapaian atas kebijakan ITF belum dapat dikatakan memuaskan, ketika mulai diterapkan pada tahun 2005. Seperti yang terjadi pada tahun 2005 inflasi aktual berada pada angka 17,11 persen dimana hal tersebut meleset jauh dari target inflasi yang ditetapkan diangka 6-7 persen. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kemampuan ITF dalam menggiring ekspektasi inflasi mulai terbukti, paling tidak hal tersebut dibuktikan dengan nilai inflasi aktual mendekati target inflasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2020 sampai 2021 inflasi aktual

kembali meleset dari target inflasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia karena adanya pandemi *covid-19* pada tahun 2020. Berikut Gambar 1 yang menunjukkan perbandingan antara target inflasi dengan inflasi aktual yang terjadi dari tahun ke tahun.



Sumber: Bank Indonesia, 2021

Gambar 1. Perbandingan *Inflation Targeting* dan Inflasi Aktual Tahun 2005-2021

Target inflasi yang tidak tercapai bukan berarti bahwa ITF secara keseluruhan tidak dilaksanakan atau kredibilitas bank sentral tergerus. Studi empiris Solikin (2009) menyatakan bahwa selama bank sentral dapat menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target inflasi adalah faktor yang tidak terduga atau bahkan di luar kendali bank sentral, maka kredibilitas bank sentral di mata masyarakat masih dapat ditingkatkan. Hal yang harus diperhatikan, melesetnya target inflasi akibat situasi tidak terduga dan tidak memuaskan yang berimplikasi pada kredibilitas bank sentral. Oleh karena itu, bank sentral perlu memperhatikan kejelasan dan pencapaian target inflasi ketika memutuskan untuk menerapkan ITF sebagai kerangka kebijakan moneter (Kadir *et al.*, 2008).

Implementasi *Inflation Targeting Framework* (ITF) telah memunculkan pro dan kontra. Studi Aguir (2004), Eduardos, *et al.*, (2008), Kadir, *et al.*, (2008), Audu & Michael (2013), dan Jendoubi (2016), menjelaskan bahwa ITF dapat mengarahkan bank sentral dalam rangka mewujudkan sasaran utama yaitu inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, temuan penelitian Wu (2004), Lin & Ye (2007), Stiglitz (2008), Ftiti & Essaadi (2013) menyatakan bahwa tidak terdapat efek yang signifikan terhadap inflasi dan variabilitas inflasi di negara yang menganut sistem ITF dan non ITF. Artinya, kebijakan moneter *inflation targeting* terbukti tidak efektif dalam meredam inflasi.

Kajian literatur Walsh (2009) menjelaskan perbandingan kinerja ekonomi makro negara-negara ITF dan non-ITF di negara maju dan negara berkembang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa kinerja ekonomi makro negara-negara ITF lebih baik. Selain itu, negara-negara ITF tidak terkait dengan ketidakstabilan ekonomi. Di negara berkembang seperti Indonesia, ITF memiliki pengaruh penting dalam menurunkan rata-rata dan volatilitas inflasi. Implementasi ITF juga terkait dengan ekonomi riil yang lebih stabil.

Diterapkan sasaran inflasi diharapkan akan menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk membawa tingkat inflasi ke tingkat yang rendah dan stabil. Pemerintah dan Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan melalui koordinasi kebijakan yang sejalan dengan sasaran inflasi. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu (*anchor*) pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan (Lestari *et al.* 2016).

Penggunaan inflasi sebagai target dalam ITF mempermudah berjalannya strategi kebijakan di suatu negara. Kebijakan moneter dapat secara langsung mempengaruhi inflasi melalui variabel moneternya. Studi yang dilakukan oleh Hove *et al.*, (2017) menjelaskan bahwa variabel moneter

seperti suku bunga dan suku bunga bank sentral berperan penting agar suku bunga mampu menurunkan inflasi secara efektif dengan bank sentral yang mandiri dan sehat. Namun, implementasi kerangka ITF yang berhasil membutuhkan koordinasi yang baik antara kebijakan moneter dan fiskal. Blanchard (2004) & Mishkin (2000) mendukung penelitian tersebut bahwa pengendalian inflasi dari strategi ITF tidak hanya dipengaruhi oleh stabilitas keuangan tetapi juga oleh stabilitas kebijakan fiskal negara. Meskipun inflasi dikelola melalui kebijakan moneter, namun mudah dideteksi karena pengaruh variabel moneter dan inflasi berhubungan langsung. Namun pengendalian inflasi melalui kebijakan fiskal juga memiliki arti tidak langsung.

Studi empiris Alamsyah *et al.*, (2001) menyimpulkan bahwa ada beberapa aspek praktis implementasi ITF yang perlu diperhatikan dalam merencanakan implementasi ITF di Indonesia, yaitu kemampuan peramalan inflasi, indikator inflasi yang akan digunakan, penetapan target inflasi, horizon dan instrumen operasional. Kemampuan mengantisipasi inflasi sangat penting karena menentukan langkah kebijakan moneter untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Implementasi target inflasi yang berhasil membutuhkan keterkaitan antar institusi pembuat kebijakan pada suatu negara. Variabel moneter dan kemampuan bank sentral untuk mendorong keseimbangan harga adalah kunci untuk mencapai target inflasi. Studi sebelumnya oleh Lin & Yeh (2009) dan Huang & Yeh (2017) menemukan bahwa variabel moneter seperti jumlah uang beredar, suku bunga, perantara keuangan (bank), dan variabel pasar saham memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian target inflasi baik di negara maju maupun negara berkembang. Studi ini menyoroti tidak hanya dampak variabel mata uang, tetapi juga dampak anggaran pemerintah dan keputusan kebijakan fiskal, serta interaksi antar lembaga yang dapat mempengaruhi inflasi.

Kebijakan moneter sebagai bagian dari penargetan inflasi, bertujuan untuk mempengaruhi permintaan agregat dan kekuatan ekonomi melalui sisi penawaran agregat. Dengan demikian, proses pertumbuhan ekonomi dapat

dibuat lebih berkelanjutan. Masalah yang muncul disini adalah tingkat implementasi kebijakan moneter. Aliran instrumen kebijakan moneter yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat inflasi sering disebut sebagai mekanisme transmisi moneter. Mekanisme yang berlangsung sangat kompleks dan hubungan antar variabel tidak stabil. Dalam keadaan ini, ketidakpastian perlu diperhitungkan saat merumuskan kerangka kebijakan moneter (Lestari, *et al.*, 2016).

Mekanisme transmisi kebijakan moneter didefinisikan sebagai cara kebijakan moneter mempengaruhi kondisi ekonomi, khususnya pendapatan nasional dan laju perubahan harga. Konsep dasar mekanisme transmisi kebijakan moneter diawali dengan instrumen kebijakan yang mempengaruhi sasaran operasional, sasaran antara, dan sasaran akhir. Dalam setiap sistem kebijakan moneter yang menggunakan kerangka penargetan inflasi, penting untuk memahami saluran transmisi kebijakan moneter dalam perekonomian. Pada akhirnya, tingkat target inflasi yang ditetapkan oleh bank sentral dan pencapaian target tersebut akan bergantung pada saluran transmisi mana yang lebih dominan dalam perekonomian. Jika mekanisme transmisi ini tidak dipahami dengan baik, maka akan mengakibatkan pengaturan kebijakan moneter yang tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, memahami mekanisme transmisi merupakan kunci untuk mengarahkan kebijakan moneter dengan cara yang memengaruhi ekonomi riil dan tingkat harga (Hasibuan dan Pratomo, 2013).

Bank sentral memiliki peran dan tujuan strategis dalam perekonomian suatu negara. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral Indonesia diberi wewenang untuk mencapai dan memelihara stabilitas mata uang. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI memiliki berbagai instrumen untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bank sentral untuk menjaga stabilitas makroekonomi melalui pengendalian kuantitas moneter seperti jumlah uang beredar (JUB), persediaan uang primer, dan suku bunga. Bank Indonesia menetapkan suku bunga sebagai alat kebijakan utama untuk mempengaruhi

kegiatan ekonomi, dengan penargetan inflasi sebagai tujuan akhir (Bank Indonesia, 2022).

Suku bunga merupakan faktor yang penting dalam perekonomian suatu negara karena sangat berpengaruh terhadap “kesehatan” suatu perekonomian. Mekanisme bekerjanya perubahan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sering menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter untuk mencapai target operasional, target antara dan akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir yaitu inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil. Mekanisme kebijakan moneter melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi (Hasibuan & Pratomo, 2013).

Bagaimana tingkat suku bunga dapat memengaruhi inflasi secara penting dapat dilihat dari perubahan dalam bentuk peningkatan atau penurunan tingkat suku bunga selalu ada hubungannya dengan tujuan untuk mengendalikan laju inflasi agar tetap stabil. Keterkaitan antara suku bunga dan inflasi telah dibuktikan dalam penelitian Mahendra (2016), Agusmianata, *et al.* (2017), Sari & Yewati (2019), dan Roeroe, *et al.* (2020) yang menunjukkan adanya hubungan positif dimana tingkat suku bunga berdampak pada inflasi di Indonesia secara signifikan. Sementara itu, penemuan Wardani, *et al.* (2021) menemukan bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia.

Menurut Bank Indonesia (2013), *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) atau suku bunga acuan adalah suku bunga kebijakan moneter yang mencerminkan sikap atau posisi yang diambil oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Bank Indonesia biasanya akan menaikkan BI7DRR jika memperkirakan inflasi ke depan akan melampaui target inflasi yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI7DRR jika memperkirakan inflasi ke depan akan berada di bawah target inflasi yang ditetapkan.

Selain suku bunga, kecenderungan inflasi dalam suatu negara juga dapat dipengaruhi oleh dampak nilai tukar mata uang, dimana nilai rupiah terhadap mata uang asing mempengaruhi inflasi ketika nilai mata uang terapresiasi atau terdepresiasi. Sebagai bank sentral di Indonesia, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kestabilan tersebut meliputi dua unsur, yaitu kestabilan nilai mata uang untuk barang dan jasa, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain (Bank Indonesia, 2016).

Studi empiris tentang pengaruh nilai tukar terhadap inflasi menemukan hasil yang beragam. Studi empiris yang dilakukan oleh Utami & Soebagiyo (2013), Kalalo, *et al.*, (2016), Mardiana & Ismail (2016), Ningsih & Kristiyanti (2018), dan Brilliant (2020) menemukan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Sementara itu, Arjunita (2016) menemukan hasil yang berbeda bahwa nilai tukar memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi di Indonesia.

Kestabilan nilai rupiah terlihat dari tingkat inflasi dan nilai tukar yang terjadi. Nilai uang yang konsisten dapat mendorong kepercayaan sektor publik dan swasta dalam mengatur usaha ekonomi mereka, seperti pengeluaran, investasi, dan penentuan harga barang produksi. Suatu perekonomian dapat dikatakan memiliki mata uang yang stabil jika nilai tukarnya tetap pada tingkat yang wajar. Pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan (Pohan, 2008). Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah terhadap US Dollar.

Selain nilai tukar, inflasi periode sebelumnya juga berdampak pada implementasi *inflation targeting* karena akan membentuk antisipasi pelaku ekonomi terhadap proyeksi tingkat inflasi aktual. Keadaan ini umumnya disebut sebagai ekspektasi inflasi. Situasi ini muncul ketika pelaku ekonomi membuat pilihan ekonomi terkait dengan biaya produksi yang didasarkan pada keadaan inflasi di masa lalu, meskipun tidak ada indikasi tekanan

permintaan yang pasti mempengaruhi kapasitas produksi pelaku ekonomi tersebut. Menurut landasan pembentukannya, antisipasi inflasi dipengaruhi oleh tiga kondisi. Pertama, tingginya persistensi inflasi pada periode sebelumnya. Kedua, ada kenaikan harga yang terus-menerus dari sisi penawaran. Dan terakhir, inflasi penawaran yang didorong oleh kebijakan moneter yang akomodatif (Dewayany, 2012).

Penelitian oleh Monfared & Akin (2017) menganalisis hubungan antara ekspektasi inflasi dan inflasi riil di Iran periode 1976 sampai dengan 2012. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dipengaruhi oleh inflasi periode sebelumnya hingga tiga periode sebelumnya. Selain itu, nilai tukar mata uang hingga enam periode terakhir memiliki dampak yang positif terhadap inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi memiliki peran penting dalam membentuk inflasi dalam periode berikutnya.

Selain variabel moneter, variabel fiskal juga berperan dalam pencapaian target inflasi di negara-negara yang menganut *Inflation Targeting Framework*. Variabel fiskal seperti jumlah penduduk, utang pemerintah, perpajakan, dan rancangan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap tingkat harga. Hal tersebut membuat dominasi fiskal dapat mengalihkan inflasi dari targetnya dan kerangka *Inflation Targeting* sulit untuk mengatasi inflasi ketika kebijakan fiskal suatu negara terlalu dominan (Mishkin, 2000).

Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan penduduk yang signifikan dapat mendorong atau menghambat perkembangan perekonomian. Jumlah penduduk yang meningkat akan menambah dan memperbesar jumlah tenaga kerja yang mengarah pada peningkatan output dan dapat memperluas sistem pasar. Pernyataan tersebut diperkuat dalam teori Malthus yang menyatakan bahwa kemajuan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan jumlah penduduk.

Studi empiris Ali *et al.*, (2013) didukung oleh Arianto, (2015) dan Bobeica, *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap inflasi dan pembangunan ekonomi tetapi pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menjadi masalah. Untuk itu setiap

peningkatan yang terjadi pada pertambahan jumlah penduduk dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi.. Sementara itu, kajian literatur Afzal (2009) didukung oleh Handayani (2016), Datu, *et al.*, (2021), Jason & Mirin (2021), dan Sari & Fisabilillah, (2021) memperoleh hasil jumlah penduduk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif dan signifikan. Menurutnya hal tersebut terjadi akibat dari peningkatan kuantitas penduduk tidak diiringi peningkatan pada kualitas sumber daya manusianya sehingga angka pertumbuhan ekonominya cenderung melambat dan akan mengakibatkan terjadinya inflasi.

Menurut Mankiw (2003) dalam ekonomi makro, pengukuran perekonomian suatu negara adalah Gross Domestic Product (GDP). GDP mengukur pergerakan pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi dengan perkembangan peningkatan output barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai GDP yang digunakan adalah GDP yang ditentukan oleh harga konstan (GDP riil) untuk memastikan bahwa angka pertumbuhan yang dihasilkan adalah pertumbuhan aktual yang dihasilkan dari produksi tambahan.

Studi empiris Abdel, *et al.*, (2007) didukung oleh Simanungkalit (2020) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan melalui pertumbuhan GDP suatu negara akan mempengaruhi peningkatan daya beli konsumen. Sementara itu, Fischer (1993) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi, dan produktifitas suatu negara tidak mempengaruhi inflasi. Fischer juga mengemukakan bahwa negara yang memiliki tingkat pertumbuhan GDP yang tinggi tidak dapat menjamin tingkat inflasi yang rendah dan defisit anggaran yang lebih kecil, dimana tingkat inflasi yang tinggi tidak konsisten dengan pertumbuhan yang permanen. Bruno, *et al.*, (1998) menemukan bahwa pengaruh antara inflasi dan pertumbuhan GDP terjadi hanya pada negara dengan tingkat inflasi yang tinggi.

Variabel fiskal lain yang mempengaruhi pencapaian *inflation targeting* di Indonesia yaitu pengeluaran pemerintah yang merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata melalui belanja negara baik itu belanja rutin maupun belanja pembangunan. Hal ini melibatkan bank sentral yang dapat bertindak guna memperluas permintaan agregat terkait kebijakan moneter (Pratama, 2018).

Penelitian Agusminata, *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Pengaruh negatif disebabkan oleh pemerintah mengambil kebijakan fiskal berupa tindakan memperkecil pengeluaran pemerintah. Berkurangnya pengeluaran pemerintah menyebabkan jumlah uang yang akan beredar di masyarakat berkurang dan dengan menaikkan pajak berarti penghasilan seseorang akan berkurang karena sebagian dari penghasilannya itu dalam bentuk pajak telah di berikan kepada pemerintah. Artinya, pendapatan disposibel berkurang yang pada gilirannya menyebabkan daya beli masyarakat juga akan berkurang. Keadaan ini menyebabkan harga-harga barang tidak naik lagi sehingga demand pull inflation dapat dikendalikan dan inflasi akan turun.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu mengenai penerapan ITF yang hanya berfokus pada pengaruh moneter terhadap pencapaian target inflasi dalam strategi ITF serta adanya perbedaan hasil pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh fiskal terhadap inflasi yang telah dilakukan, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh moneter dan fiskal terhadap pencapaian target inflasi di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah *BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)* berpengaruh terhadap *Inflation Targeting* di Indonesia?
2. Apakah Inflasi Periode Sebelumnya berpengaruh terhadap *Inflation Targeting* di Indonesia?
3. Apakah Nilai Tukar berpengaruh terhadap *Inflation Targeting* di Indonesia?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap *Inflation Targeting* di Indonesia?
5. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap *Inflation Targeting* di Indonesia?
6. Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap *Inflation Targeting* di Indonesia?

C. Pembatasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka peneliti memandang perlu dibatasi variabel permasalahan yang akan dibahas agar tidak terjadi pembahasan yang meluas dan menyimpang. Oleh karena itu, penulis membatasi hanya variabel yang berkaitan dengan “*Inflation Targeting* di Indonesia” yang mana dalam hal ini akan dibahas pengaruh variabel *BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)* (X1), Inflasi Periode Sebelumnya (X2), Nilai Tukar (X3), Pertumbuhan Ekonomi (X4), Jumlah Penduduk (X5), dan Pengeluaran Pemerintah (X6) terhadap penetapan *Inflation Targeting* di Indonesia tahun 2005-2021 karena keterbatasan data yang tersedia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pengaruh BI-7 *Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) terhadap *Inflation Targeting* di Indonesia tahun 2005-2021.
- b. Menganalisis pengaruh inflasi periode sebelumnya terhadap *Inflation Targeting* di Indonesia tahun 2005-2021.
- c. Menganalisis Pengaruh nilai tukar terhadap *Inflation Targeting* di Indonesia tahun 2005-2021.
- d. Menganalisis Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap *Inflation Targeting* di Indonesia tahun 2005-2021.
- e. Menganalisis Pengaruh jumlah penduduk terhadap *Inflation Targeting* di Indonesia tahun 2005-2021.
- f. Menganalisis Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap *Inflation Targeting* di Indonesia tahun 2005-2021.

2. Kegunaan

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan teori inflasi kuantitas, teori inflasi keynes, dan teori inflasi struktural. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian lainnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya atau sebagai acuan pengambilan kebijakan bagi pemerintah atau instansi terkait untuk mengatasi masalah *Inflation Targeting*. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti untuk bekal dalam menjadi seorang analis ekonomi dimasa yang akan datang.